

INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT BERAGAMA SEBAGAI MEDIASI KONFLIK SOSIAL

**Wawan Sopiyan, Rahmat Hidayat, Rini Setiawati,
Fais Nurul Hadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau,
Indonesia,

Charles Darwin University Australia,

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Institit Agama Islam (IAI) An Nur Lampung, Indonesia,

wawansopiyanpasundan@gmail.com,

hidayatrahmat677@gmail.com, rinisetiawati@radenintan.ac.id,

faisnurul.hadi@cdu.edu.au

Abstrak

Article History

Received :28-08-2022

Revised :10-09-2022

Accepted :24-09-2022

Keywords:

Social

Integration,

Conflict

Relating to harmonization and social in the religious community will always get special attention. Especially if a change and progress is a common goal as a result of the hard work of people living side by side with one another. Aware of the appearance of a conflict and there will also be integration in the religious community which is likened to two sides of a coin. Where a conflict is a natural process in people's lives. But in these changes it is not particularly the conflict will be placed on the negative side always. This is why a religious social life fosters the integration and progress of a civilization of human life. And religious leaders are required to be able to maintain conflict in society in a positive and supportive direction. Then a social

engineering related to integration is aimed at promoting peace and religious harmony. With great hope that this social integration process will be able to minimize the increase in issues of separatism, terrorism and religious radicalization that can damage religious harmony.

Pendahuluan

Dalam kajian sosiologi-antropologi, ketika sebuah hal yang baru atau peradaban baru masuk ke dalam struktur masyarakat sosial di luar dari masyarakat setempat maka harus melalui berbagai proses adaptasi pada lingkungan sosial tersebut (Dadang Kahmad 2002; 74). Sebagai bentuk konsekuensi logis pada tataran kehidupan dewasa ini, konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat sosial khususnya masyarakat agama memang membutuhkan perhatian yang khusus di dalam proses penanganan. Terlebih lagi bila kita melihat kajian dalam beragama, sesungguhnya kehidupan sosial dan pesan-pesan yang dibawa oleh agama atau dakwah merupakan pesan yang berisi tentang kemanusiaan, kedamaian, toleransi, solidaritas yang secara komprehensif menjadi sebuah nilai yang perlu dijaga.

Sebagai sebuah proses di dalam memenuhi kebutuhan yang dimulai dari tingkatan individu sampai pada masyarakat, adalah merupakan sebuah upaya pemenuhan yang akan diperjuangkan oleh masing-masing individu ataupun masyarakat tersebut. Dalam hal ini ini Cooley membahasnya dengan mengungkapkan sebuah kajian berupa *community* atau masyarakat setempat. Dalam pandangannya masyarakat setempat memiliki identitas komunitas, Pertama, para anggota kelompok yang saling berdekatan secara fisik satu dengan yang lainnya. Kedua, dengan jumlah anggotanya yang kecil. Ketiga, harmonisasi hubungan yang terjadi antara anggota dalam kelompok, dan Keempat, nilai keakraban sebagai relasi sosial (Soerjono Soekanto 1982; 138).

Sebagai masyarakat plural dan upaya menghadapi kondisi perubahan yang semakin cepat dan kompleks, maka seharusnya konsep agama bukanlah dijadikan sebagai *second opinion* atau strategi cadangan. Melainkan kompleksnya permasalahan atau konflik dimasyarakat secara total maka keberadaan konsep agamalah yang seharusnya dijadikan sebagai acuan. Kemudian ditambah lagi

bila kita hendak menghadapi sebuah permasalahan atau konflik sosial dalam masyarakat upaya yang terbaik adalah melakukan pencegahan dan mewaspadai akan lahirnya konflik-konflik baru yang khususnya pada masyarakat beragama. Dalam hal tersebut sangat tepat bila rasanya sebuah integrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat beragama dan menjadi sebuah nilai kerukunan hidup umat beragama dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam pengintegrasian nilai-nilai agama (Rini Setiawati 2007).

Sejauh ini agama dan masyarakat sangat erat di dalam mengajarkan yang namanya kaidah moral, tatanan kehidupan yang luhur dan beradab dalam pembangunan akhlak. Bentuk-bentuk kerusakan, perselisihan ataupun berbagai macam pertentangan yang lahir dan muncul di dalam masyarakat haruslah untuk segera di jauhi dan mencari jalan penyelesaian dengan mengutamakan perdamaian, keadilan, dan persamaan melalui musyawarah (Betty R Seharf 1995; 30). Inilah yang dinamakan nilai solidaritas dan sentimen masyarakat yang dapat memberikan ketentraman atau rasa damai.

Dalam Koentjaraningrat nilai-nilai solidaritas di dalam masyarakat pedesaan menjadi nilai sakral dan menjadi sebuah dasar kebutuhan umum dibandingkan dengan kebutuhan individu. Koentjaraningratpun menyebutkan bahwasanya nilai solidaritas yang terbangun merupakan jerih payah masyarakat secara umum, gotong-royong, kerja bakti dan menjadi sebagai nilai-nilai fundamental di dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat 1967). Dan hal tersebut terdeskripsikan di dalam tujuan bersama sebagai pemenuh dari kebutuhan masing-masing individu dalam masyarakat. Atau dalam Ferdinand Tonnies ia menyebutkan Ciri-ciri masyarakat pedesaan dengan bahasa *Gemeinschaft* (Ferdinan Tonnies 1960).

Maka sudah menjadi kesepakatan atau konsensus masyarakat bahwa urgensi agama atau agama memiliki sisi yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. hal tersebut dikarenakan agama memiliki nilai-nilai yang sangat paradigmatis dan signifikan terkait dengan realitas personal atau individual dan unsur vital sebagai realitas sosial. Sebagai masyarakat yang religius atau beragama ajaran-ajaran sumber kebenaran yang diyakini, dipedomani, dipegang akan selalu berupaya untuk difahami bagi setiap pemeluknya dan merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Hal ini ini merupakan intisari dari nilai-nilai yang

terkandung di dalam ajaran agama, baik tentang kebersamaan, persatuan sebagai bentuk membangun masyarakat yang bermartabat.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian library research (kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Abdul Rahman Sholeh menyatakan bahwa penelitian library research (Kepustakaan) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.² Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut : Pertama, : Pendekatan Penelitian. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan content analysis (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. content analysis (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa content analysis(kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Content analysis dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Kedua, Sumber data. Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan. Dalam penelitian

kepustakaan (library research) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut ; 1. Sumber data primer Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Atau data yang langsung yang berkaitan dengan objek riset. 2. Sumber data sekunder Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

Pembahasan

Konflik dan Integrasi Sosial

Landasan dasar perihal konsep yang berpengaruh dalam hal ini adalah kecenderungan tentang adanya kemampuan lokal atau sebuah metode di dalam memecahkan permasalahan. Dalam pandangan Irwan Abdullah, setidaknya terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam pembahasan ini; Pertama, masih minimnya pengembangan di dalam ilmu pengetahuan yang membahas permasalahan masyarakat di dalam mengatasi konflik. Yang di dalam catatan etnografi berbagai suku menunjukkan sensitifitas terkait tentang kesukumannya atau ancaman pada sukunya. Kedua, belum banyaknya cara untuk mengetahui sebuah permasalahan konflik disuatu tempat. Maka kesulitan yang demikian akan semakin mempersulit publik di dalam memperhatikan dan berupaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan didaerah tersebut. Secara substansi upaya di dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik seyogyanya memang harus diketahui atau dipahami secara publik dan umum (Irwan Abdullah 2008).

Jadi dalam membahas dua konsep tentang integrasi sosial dan konflik, secara kajian kebahasaan keduanya digunakan selalu beriringan. Atau satu permasalahan adalah kebalikan dari permasalahan yang lain. Konflik merupakan permasalahan yang bersifat langsung, disadari secara individu ataupun kelompok di dalam upaya mencapai tujuan bersama (Ahmad Fedyani Saifiddi 1986; 7). Ada hal penting di dalam konflik bahwa kekalahan dari lawan merupakan anggapan yang penting di dalam objek sebuah konflik dari pada ada tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian konflik. Maka dengan hadirnya agama di Tengah majemuknya masyarakat dapat menjadi sebuah pemersatu dan sebagai pemecah

belah bila dipergunakan dengan tidak bijaksana. Karena pada suatu sisi agama dapat menjadi sebuah ikatan yang dapat mencapai tujuan baik individu ataupun kolektif masyarakat (Elizabeth K Nottingham 1993; 42). Dari analisis di atas dapat kita tarik garis lurus bahwasanya agama dapat menjadi upaya pemersatu sosial dan juga adanya efek kohesi sosial atau pemecah belah (Thomas F O'dea 1987; 139).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Sholeh Isre bahwasanya konflik adalah suatu keadaan bagi kelompok yang dengan identitas jelas terlibat dalam pertentangan secara sadar dengan kelompok-kelompok lainnya. Hal tersebut terjadi karena masing-masing kelompok tersebut berupaya mempertahankan klaim terhadap sumber daya, kekuasaan apapun status yang secara prosesnya terbatas dan ditandai dengan upaya untuk mencederai, mengeliminasi menetralkan dari keeksistensian lawan (Moh. Soleh Isre 2003; 2). Dalam hal ini dikatakan bahwasanya konflik juga merupakan sebuah nilai dari interaksi sosial. yang dimana bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibedakan dari beberapa hal: Pertama, kerjasama (*cooperatori*), Kedua, persaingan (*Competition*) dan Ketiga, pertentangan atau pertikaian (*conflict*) (Soerjono Soekanto 1982; 76).

Dapat ditambahkan ada beberapa unsur yang dapat mempertajam konflik di antaranya: a) Konflik ideologis, merupakan suatu dasar konflik atas ketidak senangan atau ketidak puasan terhadap nilai-nilai sosial yang dimiliki atau dianut oleh salah satu kelompok lain diluar dari kelompoknya. Yang dimana konflik ini merupakan konflik tendensi antar kelompok atau golongan. b) Stratifikasi atau mobilitas sosial yang berubah. Berupa perubahan-perubahan kontak sosial ataupun komunikasi sosial yang berubah sejak awal sampai masa ke depan di antara individu ataupun kelompok kelompok yang mempercayai dasar-dasar awal dan kelompok tersebut tidaklah banyak menerima yang namanya perubahan. c) Dikotomi beragama atau agama dengan politik. Suatu upaya atau perjuangan di dalam bidang politik sebagai sebuah upaya di dalam mengisi kekosongan pasca kolonial yang dimana substansi isinya adalah mencampur adukkan urusan perbedaan agama dengan berbagai kepentingan politik yang hendak dicapai. Dan d) Pertumbuhan atau kambing hitam. Berupaya untuk mencari mangsa yang secara intensitas tidaklah memiliki keterkaitan di dalam

permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing kelompok. Atau impactnya masyarakat atau kelompok belum dapat menerima perubahan dan perbedaan yang secara cepat (Tago, Mahli Zainudin 2017).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Talcott Parson bahwasanya integrasi sosial di dalam kajian sosiologi merupakan sebuah paradigma fungsionalisme struktural. Yang dimana secara substansi dan hakikat masyarakat diikat dalam sebuah keseimbangan atau ekuilibrium (George Ritzer 1992; 258). Dan pembagian yang dibangun dalam dua aspek yang Pertama, Pengendalian konflik dan penyimpangan sosial dalam tatanan kehidupan dan Kedua, Penyatuan dalam unsur-unsur masyarakat. Sebuah integrasi sosial di dalam masyarakat memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Yang itu dapat berpisah dari fenomena sosial dan perubahan. Dalam Ralf Dehrendrof mengatakan bahwasanya konflik adalah Sebuah fenomena sosial yang selalu hadir (inherent omni presence). Dimana sebuah konflik tidaklah harus selalu diselesaikan dengan cara kekuasaan dan hegemoni. Artinya berbagai konflik yang muncul dimasyarakat hadirnya negara adalah diperuntukkan untuk mediasi di dalam proses penanganan konflik agar dapat diterima oleh seluruh kalangan. Terdapat dua tawaran yang disajikan dalam prosesi teoritis konflik di antaranya; a) Membangun konsensus yang mempertemukan kepentingan-kepentingan dari kelompok atau golongan yang bertikai ke dalam sebuah wadah kekuasaan yang diperuntukkan untuk mengurangi permasalahan, pertentangan dan pertikaian (Maswadi Rauf 2005; 15). b) Pengupayaan dan penguatan nilai-nilai kebersamaan yang terjadi antara kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan dengan disebut "Kontrak moral" di dalam masyarakat majemuk (Biku Parekh 2008; 87).

Dalam sebuah siklus pertentangan, ataupun pertikaian mungkin akan berjalan dan berlangsung selama-lamanya. Dan terkadang pada suatu ketika pertikaian dan pertentangan tersebut akan menemukan jalan keluar dan penyelesaian. Terkait kasus yang pertama bisa jadi sebuah konflik yang muncul mungkin saja dalam proses penyelesaian akan dapat diterima untuk sementara waktu. Yang dimana dalam kasus ini menandakan bahwasanya solusi yang dicapai belum tentu adalah sebuah kepuasan dari kedua belah pihak yang bertikai. Keadaan yang tercipta dari konflik akan membangun interaksi sosial di antara sesama masyarakat, adapun bentuk dari

interaksi sosial tersebut di antaranya adalah permulaan suatu kerjasama yang kemudian bertransformasi menjadi persaingan yang mencuat dan menjadi sebuah pertikaian yang pada akhirnya akan sampai kepada titik akomodasi.

Gillin (Soerjono Soekanto 1982; 78) dalam argumennya berupaya merekonstruksi pembagian proses sosial yang timbul diakibatkan adanya sebuah interaksi sosial. Penggolongan ataupun pengklasifikasian yang dilakukan Gillin berupaya mencari ciri khas yang berbeda dengan argumentasi yang pernah ada. Dua hal yang ia bahas, di antaranya: Pertama, Asosiatif. Sebuah upaya yang dilakukan dalam proses penggabungan atau pengkaitan satu unsur dengan unsur- unsur yang lainnya. Terdapat tiga hal di dalam proses asosiatif seperti yang diungkapkan Gillin (proses asimilasi, proses akomodasi dan proses akuntansi). Kedua, Disosiatif. Iyalah merupakan suatu cara atau metode di dalam meleraikan persaingan yang di dalamnya banyak mencakup pertentangan kontroversi ataupun pertikaian.

Terkait tentang integrasi sosial yang dikomparasikan dalam pembahasan konflik sejatinya dalam pandangan para sosiolog, konflik merupakan sebuah kontrol di dalam perjalanan organisasi kemasyarakatan ataupun personal individual. Dikarenakan pandangan tersebut mengkaitkan bahwasanya konflik tidaklah selamanya merugikan akan tetapi di lain sisi merupakan suatu kondisi yang harus dipertahankan oleh organisasi untuk mengkompromikan konflik tersebut yang diintegrasikan ke dalam perkembangan suatu kaidah bersosial. Jadi pada intinya ketika para sosiolog membahas terkait tentang integrasi sosial dan konflik, maka upaya untuk meniadakan konflik sebenarnya adalah suatu hal yang mustahil (Rini Setiawati 2007; 13).

Maka, terkait dengan integrasi sosial ataupun politik dalam pandangan Robenson ada beberapa kriteria ataupun saran yang patut kita gunakan di dalam upaya meraih ataupun sebagai mediator di tengah-tengah konflik yang sedang berjalan. Upaya tersebut dilakukan sebagai proses untuk meredakan pertikaian yang terjadi antara berbagai pihak yang berkonflik titik dan di antaranya adalah: Pertama, Adanya toleransi umum (relatifvisi kontekstual). Upaya ini dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan dasar anggapan bahwasanya nilai-nilai konteks yang terdapat di sebuah masyarakat sudahlah menurut dengan

gagasan yang menjadi kesepahaman bersama masyarakat tersebut. Maka dengan munculnya hal tersebut dirasa dapat memperkecil yang namanya miskomunikasi antar masyarakat. Kedua, Upaya untuk menumbuhkan mekanisme sosial. Pertumbuhan bentuk-bentuk integrasi sosial di dalam masyarakat yang majemuk dan bukan sinkretisme yang juga merupakan sebuah nilai dasar sosial yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Selagi konsep tersebut dapat menjaga dan mensinkronisasikan agar fungsi masyarakat tetap berjalan stabil. Ketiga, Penekanan persamaan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk persamaan persepsi kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya lebih banyak menelisik terkait tentang hal-hal yang bersama beriringan dibandingkan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam tubuh masyarakat. Dan keempat, Inklusivitas keyakinan. Hal ini merupakan deskripsi bahwasanya keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakat dengan pola-pola yang berbeda ada dan memiliki tingkat kerumitan yang berbeda Sebagai proses komitmen dalam beragama. Artinya polarisasi yang sedemikian rupa akan mengakibatkan munculnya para individu atau personal dari masyarakat dengan “tipe campuran” yang dimana tipe tersebut dapat menjadi perantara di dalam kehidupan sosial (Rolland Robenson 1995; 207-208).

Artinya dalam upaya pencegahan dan meminimalisir konflik sebagai bentuk reinterpretasi menciptakan integrasi sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Rolland sesungguhnya dapat diupayakan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut bukan tanpa suatu sebab, karena dari empat konsep atau metode yang Rolland ungkap adalah merupakan konsep-konsep kearifan yang sesungguhnya dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai ataupun kearifan tersebut disesuaikan dengan struktur ataupun kontur dari masyarakat. Dengan tidak mengedepankan perbedaan akan tetapi lebih condong pada pencocokan persamaan di antara masyarakat sosial.

Atha Mudzhar (Atha' Mudzhar 2002) dalam bukunya mengungkapkan munculnya kebiasaan konflik biasanya diakibatkan oleh empat hal seperti; a) facilitation contact Atau konteks pendukung, b) Roots of conflict (akar konflik), c) Sumbu dan d) Pemicu. Jadi, secara analisis ada berbagai prosesi sampai terjadinya konflik, di antaranya adalah terkait tentang perbedaan atau perselisihan ideologi stratifikasi sosial dan politik. Sedangkan dengan

lahirnya integrasi sosial faktor utama yang mempengaruhi adalah adanya sebuah nilai kesadaran kebersamaan masyarakat di dalam kebudayaan. Artikulasi budaya dan sistem sosial janganlah di institusionalisasikan secara langsung. Terintegrasi ke dalam nilai-nilai sosial tanpa adanya campur tangan dan lebih diutamakan pemurnian tanpa gangguan (Tago, Mahli Zainudin 2017; 88).

Dengan duduknya sebuah konsep integrasi sosial dirasa dapat menjadi sebuah penyatuan unsur-unsur masyarakat. Penyatuan kelompok dan golongan tertentu dengan persamaan tanpa perbedaan dengan artian sebuah konsep menerima hal yang baru dalam masyarakat lokal dengan konsep adaptasi (Ahmad Fedyani Saifiddi 1986; 7). Maka dari itulah sebenarnya sebuah landasan dasar dari integrasi sosial dan konflik menjadi unsur yang saling digunakan beriringan. Atau kebalikan akan nilai yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sosial.

Kekuatan Integrasi Konflik Sosial

Perbedaan tatanan dan kehidupan masyarakat secara hakikat adalah sebuah kepastian. Dimana masing-masing masyarakat sesuai dengan nilainya menempatkan sentimennya sebagai golongan atau kelompok tertentu, dengan demikian maka nilai ego-sectoral akan selalu berada di depan. Bahasa lainnya ialah pluralis yang menjadi unsur terkecil dalam kehidupan yang majemuk dari sebuah sistem sosial masyarakat. Realita ini pasti akan selalu muncul kedalam permukaan interaksi sosial serta menjadi sebuah nilai yang pasti.

Hakikat dan nilai pluralitas dalam masyarakat sesungguhnya terjadi dalam dua interaksi dan korelasi sosial, di antaranya (Depag RI 2003; 61); Pertama, pluralitas sebuah nilai sosial yang vertikal. Sebuah strata sosial yang menilai dari aspek kehidupan dan perbedaan pranata antara masyarakat dan pemerintah, atau perbedaan ekonomi (Maza, Rina El, Yuyun Yunarti, Nazeri 2022), sosial dan pendidikan (Utama et al. 2022). Kedua, sebuah nilai horisontal. Kemajemukan masyarakat menjadi sebuah nilai dan potensi yang memang berbera, dan perbedaan tersebut dengan mendasar terkait dengan agama, etnik, suku atau ras (Amar 2014).

Potensi perbedaan dan pluralitasnya masyarakat merupakan sebuah nilai dan aset serta berkontribusi dalam penciptaan persingan positif dan sehat. Tergantung bagaimana pemanfaatan perbedaan dan kemajemukan tersebut sebagai sebuah nilai yang bukan menjadi

perpecahan dan konflik sosial. Dalam dasar ini yang di kedepankan bukanlah untuk mencari penghilangan perbedaan yang menjadi kearifan dari sebuah masyarakat. Akan tetapi pemaksimalan, pengolahan dan manajemen yang baik serta mengakomodir segalanya menjadi cooperation serta competition (Rini Setiawati 2007; 15).

Secara urgensi, pluralitas atau masyarakat plural ialah merupakan sebuah realitas sosial dan terbentuk atas dasar adanya perbedaan di dalam masyarakat. Bentuk, rupa, sistem, tatanan masyarakat memiliki dasar dan klieem yang berbeda dengan masyarakat lainya, dan inilah yang menjadi dasar potensi pembangunan masyarakat yang lengkap. Struktural masyarakat yang membentuk bangunan atas konsepsi heterogenitas walaupun kehidupan masyarakat tersebut berada di tengah nilai homogen. Inilah dasar lainya yang menerangkan bahwa jenjang masyarakat dan pluralitas dilahirkan dengan tujuan untuk menjembatani perbedaan menjadi persamaan, keterbatasan menjadi ketersediaan menerima dan pembaharuan keengganan menjadi sebuah nilai kemauan masyarakat. Maka tak ayalnya sebuah ideologi sosial pun akan memiliki konteks dan konten di dalam kemajemukan yang berdeda dan bertingkat satu dan lainya. Sehingga sebagai upaya di dalam menjawab perbedaan pandangan tentang agama misalnya, pluralitas tersebut memiliki kriteria yang mesti dilakukan. Seperti; Pertama, unsur terkecil dalam kehidupan yang majemuk dari sebuah sistem sosial masyarakat. Realita ini pasti akan selalu muncul kedalam permukaan interaksi sosial serta menjadi sebuah nilai yang pasti.

Hakikat dan nilai pluralitas dalam masyarakat sesungguhnya terjadi dalam dua interaksi dan korelasi sosial, di antaranya (Depag RI 2003; 61); Pertama, pluralitas sebuah nilai sosial yang vertikal. Sebuah strata sosial yang menilai dari aspek kehidupan dan perbedaan pranata antara masyarakat dan pemerintah, atau perbedaan ekonomi (Maza, Rina El, Yuyun Yunarti, Nazeri 2022), sosial dan pendidikan (Utama et al. 2022). Kedua, sebuah nilai horisontal. Kemajemukan masyarakat menjadi sebuah nilai dan potensi yang memang berbera, dan perbedaan tersebut dengan mendasar terkait dengan agama, etnik, suku atau ras (Amar 2014).

Potensi perbedaan dan pluralitasnya masyarakat merupakan sebuah nilai dan aset serta berkontribusi dalam penciptaan persingan positif dan sehat. Tergantung bagaimana pemanfaatan perbedaan dan

kemajemukan tersebut sebagai sebuah nilai yang bukan menjadi perpecahan dan konflik sosial. Dalam dasar ini yang di kedepankan bukanlah untuk mencari penghilangan perbedaan yang menjadi kearifan dari sebuah masyarakat. Akan tetapi pemaksimalan, pengolahan dan manajemen yang baik serta mengakomodir segalanya menjadi cooperation serta competition (Rini Setiawati 2007; 15).

Secara urgensi, pluralitas atau masyarakat plural ialah merupakan sebuah realitas sosial dan terbentuk atas dasar adanya perbedaan di dalam masyarakat. Bentuk, rupa, sistem, tatanan masyarakat memiliki dasar dan klieim yang berbeda dengan masyarakat lainnya, dan inilah yang menjadi dasar potensi pembangunan masyarakat yang lengkap. Struktural masyarakat yang membentuk bangunan atas konsepsi heterogenitas walaupun kehidupan masyarakat tersebut berada di tengah nilai homogen. Inilah dasar lainya yang menerangkan bahwa jenjang masyarakat dan pluralitas dilahirkan dengan tujuan untuk menjembatani perbedaan menjadi persamaan, keterbatasan menjadi ketersediaan menerima dan pembaharuan keengganan menjadi sebuah nilai kemauan masyarakat. Maka tak ayalnya sebuah ideologi sosial pun akan memiliki konteks dan konten di dalam kemajemukan yang berdeda dan bertingkat satu dan lainya. Sehingga sebagai upaya di dalam menjawab perbedaan pandangan tentang agama misalnya, pluralitas tersebut memiliki kriteria yang mesti dilakukan. Seperti; Pertama, kesepahaman hidup bersama (Parsudi Suparlan dalam Rolland Robenson 1995; 7).

Bagi para penganut dan pengikut agama, isi kajian dan kaidah yang diajarkan oleh agama akan semaksimal mungkin ditaati dan dijalankan oleh yang meyakininya. Dengan hakikat tersebut bahwasanya agama bukanlah hanya dijadikan sebagai nilai pemenuh kebutuhan dan eksistensi semata. Akan tetapi sebagai petunjuk yang harus diyakini kebenaran dan dipedomani, dijalankan bagi setiap pemeluknya.

Dalam perjalanan dan sejarahnya, agama menjadi sebuah maghnet bagi setiap pemeluknya untuk mempertahankan eksistensi agamanya masing-masing. Bila ini tidak dicermati dan ditangkap secara bijaksana, maka agama akan berdampak negatif dan berimbas pada perpecahan (AW. Wijaya 1986; 174). Hal yang dapat ditangkap ialah agama akan berpotensi sebagai nilai integrasi sosial dan juga

dapat berdampak negatif di dalam konflik sosial. Kemudian keyakinan akan keutamaan ekspansi agamanya merupakan kewajiban utama yang tidak dapat ditawar dengan mengesampingkan kebersamaan dengan agama lain akan berakibat fatal. Klaim tentang agama yang diyakini secara konstitusi dan agama adalah dibenarkan, namun dalam tataran berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bila agama dipaksakan untuk sosial larut dan ikut dalam keyakinan kita bukanlah sebuah konsep yang dapat disandarkan pada semuanya. Ditambah lagi bila bentuk agama atau keyakinan agama sangat tertutup sampai fanatik dengan tidak terbuka pada hal-hal luaran, hal inipun merupakan pemicu konflik dan ancaman akan utuhnya tatanan masyarakat (Ignas Kleden 1984; 9).

Dorongan-dorongan yang memicu semakin melebarnya konflik ialah dikarenakan adanya persaingan antar agama yang bercorak emosional. Hal tersebut biasanya lebih banyak muncul pada golongan ataupun komunitas yang eksklusif dan cenderung minoritas. Inilah yang kemudian akan berdampak pada kecenderungan bertutup diri dengan saling berperasangka lintas kelompok atau golongan. Kecondongan lainnya bilamana sebuah konflik dan perselisihan antara umat beragama akan semakin meruncing dan tajam bila isu dan permasalahan agama diperkuat dengan unsur sara atau kesukuan dengan balutan politik, ekonomi dan sosial budaya. Landasan ini diperkuat dengan sebuah argumen bahwa setiap pemeluk agama dengan pengetahuan kebudayaannya akan kembali mengaktifkan bagian tertentu dalam ajaran agama. Yang kemudian dasar dan landasan ini dijadikan sebagai acuan di dalam membenaran anggapan yang ia anggap benar dalam dogma dan agama yang disangkakan (Rolland Robenson 1995; 6). Dasar ini bukanlah sebuah nilai yang tak beralasan, karena agama merupakan sebuah sistem nilai yang terdalam dalam kebudayaan dan sangat bersangkutan dengan masyarakat.

Adaptasi dan sosialisasi ajaran agama di dalam tugas sucinya sering terjebak pada aspek tindakan yang dilakukan oleh pemeluknya. Dan ini sangatlah bertentangan dengan landasan dasar ajaran agama tersebut. Indikasi dan acuan ini bukanlah mendeskripsikan bahwasanya kegagalan agama di dalam membumikan ajaran kebudian, kedamaian dan keluhurannya. Akan tetapi yang menjadi problemnya ialah para pemeluk agamalah yang dirasa belum memahami secara keseluruhan isi dan kandungan dari

ajaran agamanya. Pemaknaan ajaran agama yang dirasa belum pada tataran aplikasi sesuai dengan tuntunan dan aturan agama yang suci. Uraian tersebut patutlah kita telaah dan fahami secara mendalam terkait dengan sisi dan dimensi agama dalam kehidupan, seperti; a) Agama adalah sebuah rekayasa dan fenomena sosial. Artinya agama akan merubah tatanan masyarakat yang menjadikan nilai-nilainya harus mampu diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan suci. b) Agama adalah keyakinan. Artinya bagi setiap pemeluk agama adalah ia meyakini secara keseluruhan konteks dan konten agamanya dan agama-agama yang lain (Afan Ghaffar 2000; 23).

Simpulan

Masyarakat beragama sebagai sebuah nilai kemajemukan dan sosial pasti memiliki nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam hidup. Terlebih ketika kita menyoal tentang konsep dan dasar kajian beragama, ada hubungan yang harus dijalankan dalam fungsinya masing-masing. Begitupun ketika kita membahas persoalan integrasi sosial dan konflik di dalam beragama, yang dimana keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak akan terlepas dari satu dengan yang lainnya. Konflik merupakan sebuah gejala sosial yang sering kali terjadi dalam lini kehidupan masyarakat sosial dan tak ubahnya dalam beragama. Karena perubahan, pergeseran dan kemajuan pastilah akan diiringi dengan yang namanya konflik. Namun dalam sisi ini tidaklah konflik akan selalu berimbas negative dalam perubahan. Terlebih secara hakikat yang namanya kemajuan pastilah akan menemukan dan bertemu dengan perbedaan. Oleh sebabnya integrasi sosial yang merupakan netralitas di dalam mengeneralisir sebuah konflik beragama menjadi nilai fundamental dan kesadaran sosial yang terintegrasikan atas rasa persaudaraan sebagai bentuk perwujudan kesadaran hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Ghaffar. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Fedyani Saifiddi. 1986. *Konflik Dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*. Jakarta Indonesia: CV Rajawali.
- Amar, Isrofil. 2014. "Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4(2):320.
- Atha' Mudzhar. 2002. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AW. Wijaya, ed. 1986. *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta Indonesia: Akademia PT. Presindo.
- Betty R Seharf. 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Biku Parekh. 2008. *A New Politics of Identity*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dadang Kahmad. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Depag RI. 2003. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta Indonesia: Puslitbang Kehidupan Bernegara.
- Elizabeth K Nottingham. 1993. *Agama Dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta Indonesia: Rajawali Press.
- Ferdinan Tonnies, Charles P. Loomis. 1960. *Gemeinschaft and Gesellschaft (Sociology)*. New York: Bangers and College Outlines series.
- George Ritzer. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*. Jakarta Indonesia: Rajawali Press.
- Ignas Kleden, Sudajmoko. 1984. *Sebuah Psikologi Pembahasan dalam Etika*. Jakarta Indonesia: LP3ES.
- Irwan Abdullah. 2008. *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Maswadi Rauf. 2005. *Konsensus Politik Sebuah Oenjajagan Politik*. Jakarta Indonesia: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

- Maza, Rina El, Yuyun Yunarti, Nazeri, Rahmat Hidayat. 2022. "Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia." *Journal of Social Work and Science Education* 3(2):154–67.
- Moh. Soleh Isre. 2003. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta Indonesia: Depag RI.
- Rini Setiawati. 2007. "Konflik integrasi dalam masyarakat beragama." *bina al-ummah; Jurnal ilmu dakwah dan pengembangan komunitas* 2(1).
- Rolland Robenson. 1995. *Agama dalam Analisa dan Reinterpretasi Sosiologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Tago, Mahli Zainudin, Shonhaji. 2017. "Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz." *Kalam* 7(1):79.
- Thomas F O'dea. 1987. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta Indonesia: Rajawali Press.
- Utama, Esen Pramudya, Nina Ayu, Puspita Sari, Yuli Habibah, dan Rahmat Hidayat. 2022. "Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Transformasi Pendidikan Berorientasi Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Provinsi Lampung." 4(2):2491–2500.